



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

EVALUASI PENGELOLAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari pendidikan non formal (PNF) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang bertugas melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, SKB diubah menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 4 Tahun 2016. Perubahan fungsi SKB ini mengakibatkan perubahan pengelolaan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan SKB sebagai satuan pendidikan.

Penyelenggaraan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis masih mengalami berbagai kendala, karena perubahan fungsi SKB mengakibatkan perubahan dalam pengelolannya. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan kegiatan penelitian untuk mengevaluasi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis di Indonesia guna menjawab tantangan layanan pendidikan nonformal sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kendala untuk memperoleh pendidikan.

Risalah Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Balitbangbud, Kemendikbud tahun 2019 yang bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan SKB pasca diberlakukannya Permendikbud nomor 4 tahun 2016. Hasil analisis kajian tersebut berdasarkan informasi melalui pengisian kuesioner dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan responden terdiri dari Kepala-kepala SKB dan Kepala Bidang PAUD Dikmas di 5 Dinas Pendidikan kota yang ada di Kota Malang di Provinsi Jawa Timur, Kota Denpasar di Provinsi Bali, Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan sampel Kota tersebut didasarkan pada keberadaan SKB yang relatif baik dan kurang baik. Sementara itu, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data profil SKB termasuk data siswa, pamong/tutor dan tenaga kependidikan lainnya, serta data sarana prasarana SKB. Data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif.

AKSES TERHADAP SKB

Akses masyarakat terhadap SKB meningkat setelah SKB beralih fungsi, sebagaimana terindikasi pada jumlah peserta didik yang meningkat. Namun, masih ada perbedaan antara jumlah peserta didik yang masuk, yang tetap bertahan dan yang menuntaskan pelatihan keterampilan. Hal ini terjadi akibat kendala ekonomi peserta didik dan kendala sosial dalam lingkungan peserta didik.

KETERSEDIAAN PAMONG

Bertambahnya jumlah program mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan pamong belajar, baik sebagai kepala SKB maupun pengajar/tutor. Namun, ketersediaan pamong dan tutor SKB kurang optimal karena terbatasnya anggaran operasional serta meningkatnya jumlah pamong yang memasuki usia pensiun. Pada beberapa SKB bahkan terjadi fenomena 'moving', dimana pamong pindah ke SKB lain atau ke kantor dinas.

PENYELARASAN DENGAN DUDI

Relevansi SKB sebagai satuan pendidikan dalam pelatihan keterampilan cukup baik, sebagaimana terindikasi dari minat masyarakat yang sangat tinggi, khususnya untuk keterampilan Tata Boga, Tata Busana, Kecantikan, Tata Rambut, dan Tata Kulit. Selain itu, hampir semua responden SKB mengaku ikut serta melaksanakan program kewirausahaan dimana peserta didik dapat memproduksi barang yang dapat memberikan penghasilan. Namun, belum semua SKB memiliki hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DU/DI). Hanya 11 SKB yang memiliki program magang atau nota kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) dan beberapa menyatakan belum memiliki kerjasama dengan DU/DI, karena sulitnya menyatukan program SKB dengan program DU/DI. Walau hampir seluruh SKB memiliki program penyaluran program layanan pendidikan dengan dunia kerja, hanya 5 SKB saja yang memiliki program penyaluran, yang berjalan dan berlanjut.

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana SKB dinilai cukup, namun perlu diperhatikan keberlangsungannya dalam jangka panjang. Setiap SKB memiliki 5 ruang belajar dan minimal 10 sarana penunjang lainnya, seperti 1 ruang administrasi dan 1 ruang pimpinan. Hampir semua sanggar memiliki ruang tambahan yang layak digunakan, seperti ruang olah raga yang biasa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Mayoritas SKB juga memiliki sarana khusus seperti komputer dan alat pendukung keterampilan. Namun, sangat sedikit SKB yang memiliki bangunan sendiri dan tanah yang menjadi milik sendiri. Sebanyak 11 % SKB lahannya dimiliki oleh pemerintah daerah, 2% SKB lahannya merupakan tanah wakaf, dan 4% SKB lahannya kontrak. Selain itu, dari segi pemeliharaan, ada sebanyak 22% SKB menyatakan tidak memiliki program perawatan preventif. Bila ada, perawatan preventif dilakukan sekedar untuk mendukung penyelenggaraan program-program SKB.

PENDANAAN SKB

Sumber pendanaan SKB dan pengelolaannya masih beragam, termasuk yang bersumber dari pihak swasta. Secara umum anggaran pelaksanaan pendidikan dan latihan keterampilan SKB berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dan sebanyak 85% SKB tidak mendapatkan dana dari pemerintah pusat ataupun juga dari pemerintah provinsi. Sebagai satuan pendidikan mestinya SKB juga memperoleh pendanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

REKOMENDASI

1. Upaya mengatasi peserta didik agar tetap ikut program keahlian atau program akademik sampai lulus merupakan kewajiban semua pihak, baik penyelenggara program maupun peserta didik yang bersangkutan. Agar peserta didik betah belajar sampai tamat perlu dihindari tekanan yang berlebihan pada peserta didik, sehingga mereka mampu berkonsentrasi bersekolah tanpa harus putus sekolah.
2. Perlu dilakukan rekrutmen pamong agar proses pembelajaran dan pelatihan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Dalam hal ini, pemerintah daerah sesegera mungkin memetakan kebutuhan dan distribusi pamong agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat mengalokasikan kuota sesuai dengan kebutuhan dari daerah.
3. SKB tetap mempertahankan penyelenggaraan program-program keterampilan yang sudah terbukti menghasilkan lulusan yang terampil dan diminati masyarakat di seluruh SKB yang diteliti, seperti Tata Boga, Tata Busana, Kecantikan, Tata Rambut, dan Kewirausahaan, selain program kesetaraan Paket A, B, dan C. Sementara itu, formalisasi program-program kejuruan yang lebih luas perlu dipikirkan.
4. Pengajaran tentang kewirausahaan hendaknya dilakukan melalui tatap muka, membaca buku referensi dan diinternalisasikan dalam praktik. Di SKB, kewirausahaan disampaikan melalui contoh aktual dan pembuktian di lapangan untuk membentuk kemampuan berwirausaha. Hal ini merupakan cara terbaik untuk mengajarkan kewirausahaan.
5. Perlu ada peningkatan keterlibatan DU/DI yang signifikan, contohnya dengan melibatkan pengembangan SDM di sanggar dengan magang dan sertifikasi keahlian. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa SKB yang diteliti, pegawai SKB dapat dikirim untuk mengikuti pelatihan dan lokakarya terkait bidang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
6. Dengan peran dan fungsi strategis yang sudah terbukti, perlu sekali SKB memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti bangunan dan lahan untuk belajar, berlatih, dan bermain bagi peserta didik, baik yang mengikuti program akademik maupun keterampilan. Pemeliharaan sarana prasarana dimaksudkan untuk memastikan agar kondisi sarana-prasarana yang ada dapat berfungsi maksimal, sehingga kelangsungan proses belajar mengajar di sanggar terjamin. Dokumen dan manual untuk kegiatan perawatan preventif bangunan dan bengkel SKB pada seluruh SKB yang ada di Indonesia perlu dilembagakan agar kegiatan perawatan tersistem yang dilakukan secara periodik, misalkan perawatan bulanan, semesteran, atau tahunan untuk menjaga agar sarana dan prasarana sanggar belajar selalu siap digunakan dan tahan lama.
7. Alokasi dana untuk SKB perlu ditetapkan sesuai dengan porsi dan proporsi sanggar belajar untuk menciptakan masyarakat terdidik dan masyarakat yang terampil. Mempertimbangkan peran SKB yang strategis maka bobot dan urgensi pendanaan sanggar belajar ini sudah saatnya ditingkatkan dengan mempertegas sumber pendanaan SKB serta menetapkan aturan terkait pendanaan seperti layaknya sebuah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Sosialisasi program-program SKB pada masyarakat perlu terus dilakukan sehingga perlu dianggarkan dana promosi yang dilakukan baik melalui media daring, media cetak brosur, spanduk maupun presentasi langsung dalam pertemuan atau rapat-rapat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, F. and Nasution, S. (2017) 'Community Empowerment Throught Education , Religion , Social , Economic , And Health', Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat, 3(April), pp. 61–73.
- Franitasari, M., Wilson and Maemunaty, T. (2018) 'Effectiveness Performance Tutor Program Equal Education Package C in Unitary Education Non Formal Sanggar Activity Learning Pekanbaru City', Jom Fkip, 5(2), pp. 1–14. Available at: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/viewFile/20784/20109>.
- Hew, K. F., Qiao, C. and Tang, Y. (2018) 'Understanding student engagement in large-scale open online courses: A machine learning facilitated analysis of student's reflections in 18 highly rated MOOCs', International Review of Research in Open and Distance Learning, 19(3), pp. 69–93. doi: 10.19173/irrodl.v19i3.3596.
- Irdianto, W. and Putra, A. B. N. R. (2016) 'The Influence of Education and Economic Background Towards The Training Participants ' Motivation and Study Result of UPT-PK Singosari Malang', in AIP Conference Proceeding, pp. 1–7. doi: 10.1063/1.4965795.
- Kusumawati, N. (2018) 'Management Of Education And Training Program For Non Formal Education Teachers In Learning Activity Workshop Of Bantul District Oleh:', Pengelolaan Program Diklat, 1(1), pp. 1–11.
- Laila Nursafitri (2015) 'Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Lesson Study', Portal Garuda, (20), pp. 1–18. Available at: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374769&val=7241&title=Improving The Quality Of Learning Through Lesson Study>.
- Rahmat, A. (2017) 'Manajemen Supervisi Akademik Pendidikan Nonformal Melalui Professional Developmpment For Education Personnel Di Sanggar Kegiatan Belajar Limboto Kabupaten Gorontalo', At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah, 6(1), pp. 89–105.
- Rataj, M. R. and Eriksson, R. (2018) 'Entrepreneurial skills and regional development . How new entrepreneurs contribute to transformation of regional economy under diverging regional settings . ', in the DRUID Academy Conference 2018. Odense, Denmark, pp. 1–17.
- Setiawati, A. A. A., Astawa, I. N. T. and Adnyani, N. W. S. (2018) 'Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Non Formal Di Bimbingan Belajar Be Star Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Kabupaten Bangli', Jurnal Penelitian Agama Hindu, 2(2), pp. 564–568.

**Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :**

**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman–Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.**

Tim Penyusun :

Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si
Parwanto
Drs. Widodo. M.Pd
Dyah Suryawati